

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan suatu proses yang menunjang kesejahteraan masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui produktivitas yang dikembangkan dengan adanya pembangunan desa. Pembangunan ekonomi selalu ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya. Kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai keseluruhan usaha pembangunan yang dijalankan masyarakat seutuhnya dalam rangka meningkatkan usaha pemerataan pembangunan. Dengan berdasarkan pendekatan pembangunan bahwa pembangunan dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan bantuan pemerintah maka adanya keseimbangan kewajiban yang harus dilaksanakan bersama pemerintah dan masyarakat secara seimbang antara keduanya, yaitu pemerintah memberi bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan. Sedangkan masyarakat yang memberikan partisipasinya dalam pembangunan yang berbentuk prakarsa dan swadaya gotong royong pada setiap pembangunan yang dilaksanakan.

Dana Desa menjadi topik yang menarik di kalangan masyarakat, baik topik tentang otonomi daerah khususnya tentang desa, maupun peraturan-peraturan yang meliputinya. Topik tentang Dana Desa ini sangat menyita perhatian masyarakat Indonesia, karena negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas terbentang dari Sabang sampai dengan Merauke yang memiliki jumlah desa sejumlah 74.954 desa didalamnya. Angka desa tersebut akan menerima kucuran uang transfer dari dana APBN guna untuk melakukan pembangunan desa. Tidak hanya itu, dana yang akan dikucurkan kepada setiap desa tersebut memiliki jumlah yang sangat besar, mulai dari sekitar 700 miliar hingga 1,4 miliar rupiah. Berkenaan dengan

dikucurkannya Dana Desa dan alokasi Dana Desa diharapkan proses pembangunan daerah secara keseluruhan akan dapat ditingkatkan dan secara bersama ketimpangan pembangunan antar wilayah akan pula dapat dikurangi. Alokasi dana yang merata dan tepat sasaran serta manajemen pengelolaan Dana Desa secara optimal, efisien dan efektifitas dalam penggunaan anggaran belanja merupakan hal pokok yang harus selalu diprioritaskan (Kemendesa, 2016).

Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah yaitu Desa. Pemerintah Desa diyakini lebih mampu melihat kebutuhan yang harus lebih di prioritaskan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan (M Sofiyanto, Mardani, & Salim, 2016).

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran APBN yang ditujukan untuk desa yang kemudian di transfer melalui anggaran belanja daerah kota/kabupaten. Dana ini dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan masyarakat. Dana Desa menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Dimana dalam UU tersebut dijelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara. Dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk dan angka kemiskinan (Kemendesa, 2018).

Sedangkan definisi alokasi Dana Desa adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah/kabupaten untuk desa paling sedikit 10%. Maka alokasi Dana Desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan dana perimbangan keuangan pusat yang dibagikan secara proposional. Pada saat ini Dana Desa bisa dianggap sebagai sebuah isu nasional, itu disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, angka Dana Desa yang diusulkan akan terus membesar. Kedua, pemerintah saat ini sedang menempatkan pembangunan Indonesia dari pinggiran dan itu dimulai dari desa, oleh karena itu saat ini desa memiliki kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri menuju kesejahteraan bagi warganya (Andajani, Widjaja, & Prihatiningrum, 2017).

Alokasi APBN yang sebesar 10% tadi, saat diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat. Penerimaan desa yang meningkat ini tentunya diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa. Laporan pertanggungjawaban itu berpedoman pada Permen No 113 tahun 2014. Dana Desa memiliki prioritas tersendiri dalam penggunaannya, tentu saja yang akan berkaitan dengan ekonomi di desa tersebut. Prioritas penggunaan Dana Desa dibagi menjadi 5 hal:

1. Mendukung dari sisi permodalan pada pengelolaan usaha ekonomi yang produktif.
2. Menjalankan distribusi dan pemasaran bagi usaha pertanian yang produktif dan usaha lain yang mengarah pada produk unggulan desa.
3. Memberikan akses modal pada warga/masyarakat, koperasi, lembaga ekonomi masyarakat lainnya.
4. Melakukan perluasan usaha produktif di desa dengan system penyertaan modal pengelolaan produksi.
5. Mendukung perluasan lapangan kerja bagi masyarakat desa.
6. sejak dinyatakan jumlah Dana Desa akan terus bertambah, isu-isu tentang Dana Desa terus membesar.

Dari 5 hal yang menjadi prioritas Dana Desa tersebut merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat desa, sehingga apabila suatu desa memiliki badan usaha yang dapat menjadi penghasilan

desanya maka akan ada peningkatan dari segi Pendapatan Asli Daerah dan tentunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Dana Desa memang tidak hanya berfokus kepada pembangunan infrastruktur saja. Baru-baru ini pemerintah mengganti prioritas penggunaan Dana Desa yang sebelumnya fokus pada pembangunan infrastruktur menjadi fokus kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Memang hal tersebut hanya difokuskan kepada desa-desa yang telah memiliki infrastruktur yang memadai untuk pelaksanaan ekonomi tersebut. Pengembangan ekonomi masyarakat tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai bagi desa tersebut. Apabila telah terpenuhi pembangunan infrastruktur maka desa tersebut harus fokus kepada pengentasan angka kemiskinan di pedesaan dengan mendorong perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) di pedesaan. Tentunya perbaikan kualitas tersebut harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di masing-desa seperti, pertanian, peternakan, wisata, dan lain-lain. Apabila masyarakat telah dapat mengelola potensi yang ada di desanya dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakatnya, yang menyebabkan berkurangnya angka pengangguran di desa serta pendapatan warga meningkat, maka akan semakin banyak masyarakat desa yang keluar dari garis kemiskinan.

Tentu dalam praktiknya pengembangan desa maju dan mandiri bukanlah menjadi sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan oleh pemerintah. Semua pihak perlu terlibat dalam program yang dibuat oleh pemerintah ini dengan tujuan untuk mensejahterakan desa. Dimulai dari pemerintah pusat hingga seluruh warga desa harus ikut serta bergotong royong untuk memajukan desa, baik itu melalui ekonomi, infrastruktur, pendidikan, pemberdayaan dan lainnya agar dapat terwujud desa yang maju dan mandiri. Namun dalam menuju desa yang maju dan mandiri suatu desa haruslah memiliki manajemen Dana Desa yang baik, itu semua bertujuan agar Dana Desa yang jumlahnya besar tersebut dapat teralokasikan dengan baik dalam penggunaannya, tidak salah sasaran dan objeknya. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan desa akan menjadi signifikan karena semuanya dilakukan dengan efektif. Tentunya Islam akan memiliki pandangan sendiri dalam melihat permasalahan ini. Memang tidak ada kaitannya secara signifikan antara

pembangunan desa dengan pandangan Islam. Akan tetapi jika perspektif Islam dapat dijadikan acuan dalam melihat permasalahan manajemen Dana Desa, tentunya akan menjadi sebuah kolaborasi yang baik dari kedua perspektif tersebut (Todaro, 2003).

Penelitian ini akan dilakukan pada tiga desa yaitu Desa Wonokerto, Desa Tamanmartani, dan Desa Selomartani. Desa tersebut dipilih karena tergolong dari pada desa maju dan mandiri. Desa tamanmartani dan Selomartani telah masuk kepada 100 Indeks Desa Membangun (IDM) dengan serapan dana desa yang mencapai 100% serta menjadi acuan pusat pada pengelolaan dana desanya, karena telah melakukan pelaksanaan sesuai dengan apa yang telah diprioritaskan oleh pemerintah (Suprobo, 2019).

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis ini menggunakan model CIBEST (Centre Of Islamic Business And Economic Studies) CIBEST merupakan sebuah model perhitungan kesejahteraan dan kemiskinan yang didasarkan pada kemampuan kebutuhan spiritual dan kebutuhan material. Kemudian yang menjadi isu utama dalam model CIBEST ini adalah bagaimana kita dapat menetapkan standar kebutuhan spiritual, sehingga ini dapat mempermudah kita dalam menganalisis suatu keluarga masuk kedalam keluarga miskin spiritual, atau keluarga yang kaya spiritual (Irfan Syauqi Beik, 2016).

Pembangunan menurut (Todaro, 2003) merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup perubahan dasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, institusi nasional. Di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan adanya ketimpangan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan. Hal-hal ini yang kemudian mengindikasikan perubahan total yang terjadi di dalam masyarakat dan sistem sosialnya untuk bergerak maju mencapai kondisi yang lebih baik secara material maupun spiritual. Pernyataan tersebut menandakan pembangunan yang dilakukan dengan baik menuju suatu perubahan total, akan membuat masyarakat bergerak maju secara spiritual. Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam arti luas. Hal tersebutlah yang membuat peneliti ingin melakukan penelitian apakah adanya

pembangunan di desa akan membuat tingkat spiritual masyarakat meningkat atau malah sebaliknya.

Berdasarkan dari uraian tersebut, maka fokus utama dari penelitian ini adalah melihat bagaimana pengelolaan manajemen Dana Desa dalam pembangunan desa maju dan mandiri terhadap tingkat spiritualitas masyarakat. Dari uraian latar belakang tersebut penulis mencoba untuk mengangkat topik permasalahan tersebut kedalam skripsi yang berjudul **"Analisis Manajemen Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Maju dan Mandiri Terhadap Garis Kemiskinan Spiritual Masyarakat"**

#### **B. Rumusan Masalah**

Pengelolaan manajemen Dana Desa dalam pembangunan desa maju dan mandiri terhadap garis kemiskinan spiritual masyarakat. Manajemen Dana Desa membuat pembangunan desa membaik, sedangkan pembangunan desa yang tepat membuat garis kemiskinan spiritual masyarakat meningkat. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pengelolaan manajemen Dana Desa dalam pembangunan desa?
2. Bagaimana dampak pembangunan desa terhadap garis kemiskinan spiritual masyarakat?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi proses pengelolaan manajemen Dana Desa dalam pembangunan desa maju dan mandiri
2. Menganalisis bagaimana pembangunan desa mendongkrak atau mengangkat garis kemiskinan spiritual masyarakat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan implikasi positif yakni:

1. Akademis

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dalam karya tulis penelitian sejenisnya tentang Pengelolaan Manajemen Dana Desa dalam perspektif ekonomi Islam. Manajemen Dana Desa saat ini masih menjadi topik yang hangat baru-baru ini sangat menarik untuk dikaji. Hal ini menciptakan gagasan peneliti dalam meneliti fenomena yang terjadi.

## 2. Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi wawasan dan pengetahuan baru bagi kalangan masyarakat mengenai pengelolaan manajemen Dana Desa terhadap pembangunan desa maju dan mandiri dan dapat ditinjau dalam persepektif ekonomi Islam.

## 3. Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi informasi baru bagi Pemerintah dalam hal manajemen Dana Desa. Pemerintah juga dapat mengevaluasi, sehingga dapat memberikan perkembangan yang baik bagi perkembangan desa di Indonesia.

## E. Sistematika Penulisan

### Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai arti penting dari penelitian, apa yang diteliti, dan untuk apa penelitian ini dilakukan. Permasalahan-permasalahan yang dibahas di latar belakang akan membuat rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat yang akan diperoleh, serta sistematika penulisan.

### Bab II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai teori-teori atas penelitian yang dilakukan. Yang mana nantinya teori menjadi dasar membantu penyusunan penelitian. Dalam bab ini juga akan dikemukakan mengenai tinjauan penelitian terdahulu.

### Bab III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang dipilih dalam penelitian, yakni: Desain Penelitian, Lokasi Penelitian, Waktu Pelaksanaan Penelitian, Obyek Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian, dan Teknik Analisis Data Penelitian yang digunakan.

#### Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian dan pembahasan yang menjelaskan mengenai temuan-temuan yang didapatkan selama melakukan penelitian.

#### Bab V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan memberikan saran untuk perbaikan pada penelitian di masa yang akan datang.

